

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia selain itu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar daerah. Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al., 2021).

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019).

Kemiskinan masih menjadi masalah di dunia terutama bagi negara berkembang. Masalah kemiskinan di negara maju adalah salah satu bagian kecil dalam komponen penduduk mereka tapi bagi negara berkembang hal ini menjadi sangat rumit karna hampir separuh dari jumlah penduduk merupakan penduduk

miskin. Persoalannya sama namun tingkat kesulitan dan tingkat kerumitan masalah kemiskinan di negara maju dengan masalah kemiskinan di negara berkembang sangat berbeda.

Kemiskinan selalu menjadi kendala yang sangat sering muncul sepanjang sejarah bahkan tak pernah absen dalam setiap tahunnya. Ini dikarenakan pemerintah belum memiliki cara dan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, strategi yang berbeda harus dibuat untuk memperkuat peran dan status perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional. Kebijakan yang dipilih harus memihak dan mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus selalu didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang benar, dan pemahaman yang jelas tentang akar permasalahannya.

Menerapkan otonomi daerah merupakan salah satu upaya dan strategi pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan, setiap pemerintah daerah berhak mengurus daerahnya sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerahnya sendiri. Ada beragam program dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yang hingga saat ini masih belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan ini, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Berasa Miskin (Raskin), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai dan sebagainya.

Tingginya jumlah penduduk miskin dapat dianggap sebagai tolak ukur yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Permasalahan jumlah penduduk miskin ini juga melanda seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satunya. Provinsi Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-indonesia dari 35 provinsi lainnya, yaitu sebesar 49,405 juta jiwa. Tingginya angka penduduk di Provinsi Jawa Barat ini dapat memunculkan masalah ekonomi yang cukup serius, salah satu masalah yang cukup serius ini adalah tingginya angka jumlah penduduk miskin. Tingginya jumlah penduduk miskin ini adalah masalah yang cukup sukar untuk dipecahkan sehingga masalahnya selalu ada dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan jumlah kepadatan penduduk Indonesia yang terus meningkat terutama di Provinsi Jawa Barat, namun kepadatan penduduk ini tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan minimnya permintaan akan tenaga kerja sehingga sulit bagi penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena tidak adanya pemasukan atau pendapatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Kemiskinan (Ribuan Jiwa) di Jawa Tahun 2021-2022

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu menjadi 4.144,0 ribu jiwa. Angka tersebut membuat Jawa Barat termasuk dalam salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Jawa Barat berada di tempat ke 2 sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak se-Indonesia sedangkan yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Timur lalu tertinggi ke 3 adalah Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.2
Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022

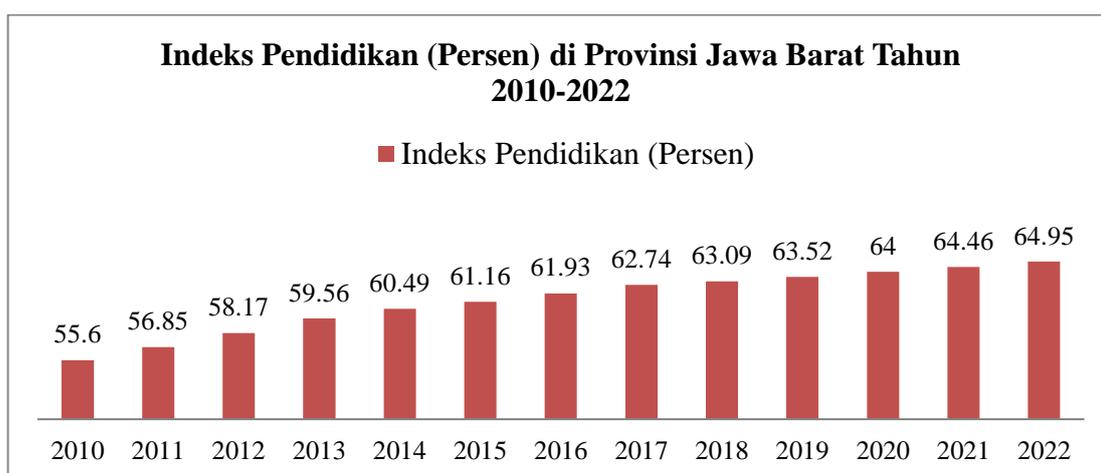
Dilihat dari jumlah penduduk miskin, pada tahun 2010 penduduk miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah 4.815,2 ribu jiwa jumlahnya terus menurun hingga tahun 2014 jumlahnya menjadi 4.331,1 ribu jiwa. Namun pada tahun 2015 angkanya naik dari tahun sebelumnya menjadi 4.532,5 ribu jiwa, pada

tahun 2016 penduduk miskin terus menurun hingga tahun 2019 jumlahnya menjadi 3.463,8 ribu jiwa, penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan secara sinergi dan kolaborasi dalam penanganan kemiskinan. Semua terlibat mulai dari Dinas Sosial, DP3AP2KB, dan Disnaker untuk memutus mata rantai kemiskinan tidak hanya sumber daya manusianya juga meningkatkan kualitas pendidikannya. Namun pada tahun 2020 dan 2021 angkanya naik dari tahun sebelumnya menjadi 3.993,8 ribu jiwa dan 4.275,9 ribu jiwa. Sedangkan, pada tahun 2022 angkanya turun dari tahun sebelumnya menjadi 4.144,0 ribu jiwa. Hal ini terjadi karena terjadinya pandemi Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 dan melumpuhkan berbagai sektor perekonomian. Angka ini akan terus bertambah apabila pemerintah tidak turun tangan dan melakukan pembenahan. Maka hal ini harus menjadi perhatian pemerintah lebih mendalam agar tidak semakin menyebabkan terjadinya kesenjangan terhadap taraf kesejahteraan hidup masyarakat khususnya di Jawa Barat, sebab kemiskinan merupakan akar dari berbagai permasalahan yang dapat terjadi di suatu negara, misalnya kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan masalah sosial lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, karena tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pendidikan menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan manusia serta pekerja dalam proses pembangunan.

Pendidikan telah menjadi bagian penting bagi suatu bangsa dan juga seluruh lapisan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disebut dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peneliti memilih indeks pendidikan sebagai indikator pendidikan karena menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka indeks pendidikan semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. (*Sistem Informasi Rujukan Statistik - View Indikator*, n.d.)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.3
Grafik Indeks Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022

Dapat dilihat bahwa indeks pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2022 mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya, pada tahun 2010 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 55,6%, pada tahun 2011 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 56,85%, pada tahun 2012 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 58,17%, pada tahun 2013 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 59,56%, pada tahun 2014 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 60,49%, pada tahun 2015 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 61,16%, pada tahun 2016 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 61,93%, pada tahun 2017 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 62,74%, pada tahun 2018 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 63,09%, pada tahun 2019 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 63,52%, pada tahun 2020 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 64%, pada tahun 2021 angka yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu 64,46%, angka ini terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2022 yaitu sebesar 64,95%.

Penyebab kemiskinan lainnya adalah pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran telah menimbulkan masalah besar, terutama di negara-negara berkembang. Pengangguran yang berlangsung cukup lama dan berkelanjutan akan menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat, karena tidak ada pendapatan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rasio ketergantungan antara pekerja dan pengangguran tinggi.

Indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), karena pemerintah sering menggunakan indikator utama ini untuk mengukur keberhasilannya di bidang ketenagakerjaan, terutama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk mengukur tingkat pengangguran, dimana TPT adalah rasio dari total pengangguran terhadap total angkatan kerja.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.4
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022

Selanjutnya juga dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 sebesar 10,35% kemudian angkanya menurun hingga tahun 2012 menjadi 8,93%. Namun pada tahun selanjutnya 2013 angkanya naik sebesar 9,07% kemudian angkanya turun tahun 2014 sebesar 8,45% dan tingkat pengangguran terbuka angkanya naik pada tahun 2015 sebesar 8,57%. Kemudian angkanya menurun hingga tahun 2017 menjadi 7,90%. Angka tingkat pengangguran terbuka meningkat sangat mungkin dikarenakan meningkatnya jumlah angkatan kerja

sedangkan lapangan pekerjaan tetap atau bahkan menurun membuat angkatan kerja tidak dapat diserap karena rasio nya tidak seimbang. Tahun-tahun selanjutnya angka menurun hingga pada tahun 2020 angka pengangguran terbuka kembali meningkat, kemungkinan penyebabnya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga melumpuhkan beberapa sektor termasuk ekonomi hingga banyak sekali angkatan kerja yang tidak terserap bahkan banyak pula para pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Sugiarti pada tahun 2012 meneliti bagaimana Pengaruh antara Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Penduduk Di Indonesia menemukan bahwa kedua variabel independen (rata-rata lama bersekolah dan persentase pengangguran) secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi angka Persentase Penduduk Miskin pada setiap provinsi di Indonesia. Selain itu, Ibnu Hadi Pradana meneliti bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2015 menemukan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasar pada uraian yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022.
2. Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kegunaan :

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi pembangunan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tidak hanya teori yang didapat selama kuliah namun juga dengan praktiknya langsung dilapangan, sehingga peneliti dapat menemukan perbandingan antara teori dan kenyataan langsung yang terjadi di lapangan.

2 Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal perumusan ataupun pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.

3 Bagi Lembaga/Fakultas Ekonomi

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber untuk perkuliahan khususnya di Jurusan Ekonomi Pembangunan dan juga diharapkan memperkaya penelitian sejenis yang pernah diteliti sehingga dapat digunakan oleh teman-teman mahasiswa.

4 Bagi pihak lain

Diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kegunaan bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan juga petunjuk pada masalah yang serupa ataupun sebagai masukan bagi pihak lain yang membutuhkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan melalui situs BPS Provinsi Jawa Barat, karena untuk mengetahui seperti apa dan sejauh mana pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan dan juga agar mendapatkan data untuk menunjang usulan penelitian ini.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penulis telah melakukan penelitian ini sejak bulan Juni 2023 hingga bulan November 2023, yang dimulai dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan dan diakhiri dengan ujian skripsi dan komprehensif.